

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah Kependudukan (PWKL4101) yang memiliki bobot 3 sks, merupakan mata kuliah yang secara umum membahas tentang hubungan antara kependudukan dengan pembangunan. Hal tersebut dijabarkan ke dalam beberapa aspek penting dalam studi kependudukan, yaitu konsep, teori, pengukuran, dan hubungan antara penduduk dengan faktor non kependudukan. Untuk memudahkan memahami alur pikir dan cakupan bidang ilmu secara baik, maka struktur pokok bahasan disusun dalam 10 pokok bahasan secara berurutan yaitu konsep dasar dan cakupan studi kependudukan, teori penduduk, sumber data, struktur penduduk, proses demografi, kualitas penduduk, pembangunan berwawasan kependudukan, penduduk dan lingkungan, kebijakan kependudukan, dan perencanaan kependudukan. Materi yang dibahas dalam modul ini mencakup garis besar isu-isu yang ada dimasing-masing pokok bahasan. Untuk lebih memahami isu-isu tersebut maka mahasiswa diwajibkan menelusuri literatur yang terkait. Disamping itu, mahasiswa disarankan pula untuk secara aktif menelusuri data kependudukan yang terbaru, terutama yang berasal dari lembaga resmi yang mengumpulkan data kependudukan, misalnya Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta lembaga terkait lainnya.

Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa menerapkan pengetahuannya tentang kependudukan dalam perencanaan wilayah dan kota. Secara khusus, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut.

1. Mampu menjelaskan konsep dasar kependudukan, cakupan studi kependudukan, dan teori penduduk.
2. Mampu menjelaskan perbedaan, kelemahan dan kelebihan sensus penduduk, survei dan registrasi penduduk.
3. Mampu menjelaskan perubahan jumlah, distribusi dan komposisi penduduk serta dampaknya terhadap permasalahan sosial ekonomi dan politik.
4. Mampu menghitung parameter dasar fertilitas, mortalitas dan migrasi serta menjelaskan pengaruh fertilitas, mortalitas dan migrasi terhadap perubahan struktur penduduk.
5. Mampu menghitung indikator kualitas penduduk (Indek Pembangunan Manusia) dan menjelaskan pentingnya kualitas penduduk dalam pembangunan wilayah.

6. Mampu menjelaskan konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan kaitannya dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
7. Mampu menjelaskan hubungan antara penduduk dan lingkungan secara konseptual maupun empiris.
8. Mampu menjelaskan dasar normatif, jenis, praktik kebijakan kependudukan serta hubungan antara kebijakan kependudukan dan pembangunan wilayah.
9. Dapat menjelaskan tentang manfaat proyeksi penduduk untuk pembangunan wilayah.

Kompetensi tersebut merupakan cerminan dari kompetensi ke-9 modul. Modul 1 sampai dengan 4 berisi tentang konsep teori serta pengukuran parameter kependudukan yang sekaligus menggambarkan isu kuantitas penduduk. Modul 1 sampai dengan 4 saling terkait. Sebagai contoh, pembahasan tentang konsep dan teori merupakan dasar bagi pemahaman secara menyeluruh kaitan antara penduduk dan pembangunan. Hal ini digunakan dalam memahami pembahasan tentang struktur penduduk. Sementara itu perubahan struktur penduduk bersamaan dengan dampaknya terhadap variabel sosial ekonomi dan politik tidak dapat dilakukan jika mahasiswa tidak faham tentang parameter peubahnya serta bagaimana mengukurnya. Pengukuran tidak dapat dipahami jika tidak mengetahui sumber data yang dapat digunakan dalam pengukuran tersebut. Modul 5 secara khusus membahas tentang kualitas penduduk yang perannya dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan kuantitas penduduk yang dibahas pada Modul 1 sampai dengan 4. Modul 6 dan 7 membahas kaitan antara penduduk dengan aspek penting di luarnya, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan lingkungan. Pengetahuan yang diperoleh dari modul 1 sampai dengan 5 sangat penting untuk memahami isu-isu di sekitar konsep SDGs maupun lingkungan. Pembahasan pada Modul 8 difokuskan pada kebijakan kependudukan sebagai dasar bagi diskusi lebih lanjut di Modul 9 yang berisi tentang perencanaan kependudukan. Permasalahan yang berkembang di pembahasan tentang kuantitas dan kualitas penduduk, serta SDGs dan lingkungan merupakan dasar untuk memahami tentang kebijakan kependudukan yang perlu dan sudah dilakukan beserta kelemahannya.

Untuk mempermudah dan juga membatasi pembahasan, setiap modul akan dibagi menjadi 2 sampai dengan 4 sub pokok bahasan. Susunan materi sebagaimana telah disebutkan di atas, merupakan upaya agar mahasiswa memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang kependudukan dan bagaimana aspek kependudukan digunakan dalam pembangunan dan

perencanaan wilayah. Hal tersebut akan menjadi modal penting bagi mahasiswa, sebab selain konsep dan teori, mahasiswa akan mampu melakukan pengukuran parameter kependudukan yang sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan.

Ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa pengguna buku ini. Kondisi kependudukan baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sangat variatif dan berkembang secara dinamis. Artinya, bahwa kita tidak dapat mengandalkan hanya pada data di level tertentu dan pada referensi tahun tertentu. Untuk dapat mengikuti variasi dan perkembangan data kependudukan mahasiswa sangat disarankan untuk mengkaji data di daerahnya masing-masing untuk tahun terbaru pada masing-masing bahasan. Untuk dapat memahami konteks data secara lebih baik, maka diperlukan juga membandingkan dengan data di unit administrasi di atasnya dan nasional.

Hal lain yang perlu untuk diperhatikan adalah perubahan dan perkembangan konvensi internasional serta regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Efek MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang menghasilkan konvensi tentang area bebas perdagangan, baik barang maupun jasa, misalnya akan memberikan dampak terhadap arus migrasi di Indonesia. Di tingkat nasional, perkembangan desentralisasi dan juga demokratisasi akan membawa dampak yang besar terhadap permasalahan kependudukan di Indonesia. Revisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013; disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan perubahannya melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 merupakan contoh bahwa perubahan regulasi berjalan dengan cepat. Hal ini harus diantisipasi oleh mahasiswa dengan cara selalu mengikuti dan meng *up date* perubahan tersebut. Hal tersebut akan membantu mahasiswa dalam mengerjakan tes formatif sekaligus memperluas pemahaman terhadap isu kependudukan kontemporer terutama terkait dengan pembangunan wilayah.

Peta Kompetensi
PWKL4101 /Kependudukan/3sks

